

FEMINISME DALAM KEPEMIMPINAN

Nuryati*

Abstrak : *Kepemimpinan merupakan suatu subjek yang sudah lama di minati para ilmuwan maupun orang awam. Kepemimpinan tersebut berisi konotasi tentang citra individu-individu yang berkuasa dan dinamis yang memimpin armada yang memimpin perang, yang mengendalikan kerajaan-kerajaan korporasi dari atas gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan, atau yang mengarahkan tujuan bangsa-bangsa. Feminisme adalah emansipasi wanita. Sedangkan Emansipasi sendiri merupakan pembebasan diri dari perbudakan. Jadi, Feminisme dalam Kepemimpinan merupakan salah satu cara para perempuan unruk memperoleh hak dan drajat yang sama dengan kaum pria.*

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Feminisme*

Pendahuluan

Kepemimpinan adalah suatu sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi misi yang kuat. Sedangkan pemimpin merupakan orang yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, hal ini sangat relevan ketika, seorang pemimpin memiliki sikap intelektual, bermoral, amanah dan profesional. Jika berbicara tentang kepemimpinan pasti di pikiran masyarakat umumnya identik dengan kaum adam atau pria padahal jika kita menelaah perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, yang tidak jauh berbeda keahliannya dalam memberi arahan, dalam berorasi maupun beretorika atau bahkan memberi gagasan.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin (*leadership*), Wanita tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada kehidupan bermasyarakat, dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunannya saja,

*Penulis adalah Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut pandang yang berlainan bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang perempuan tradisional dianggap sebagai “cadangan” contohnya umur belia sudah diharuskan menikah tanpa mengenyam pendidikan wajib, umumnya masyarakat yang masih dipedesaan dan kenyataan-kenyataan lainnya seputar feminisme.

Dengan terciptanya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan dapat membawa dampak yang positif yaitu permasalahan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan (diskriminasi) antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki peluang atau akses yang sama dalam kepemimpinan. Hal itu ditandai dengan perempuan yang mampu memberikan suara, berpartisipasi dalam pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini merupakan kebijakan tersendiri yang memiliki manfaat persamaan serta adil dari pembangunan. Hal ini harus selalu dibuktikan bahwa wanita dapat semakin maju dalam kepemimpinan.

Arti seorang perempuan dalam kepemimpinan terutama dalam pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan terutama dalam segi pemikiran dan kreasi untuk mengembangkan dalam mewujudkan tujuan. Tidak ada yang salah bukan jika perempuan menjadi seorang pemimpin.

Feminisme

Feminisme adalah paham atau keyakinan bahwa perempuan benar-benar bagian dari alam manusia, bukan dari yang lain yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat kodrat dan fitrahnya. Kesetaraan ini biasanya disebut juga dengan istilah kesetaraan gender (*gender equality*). Dalam hal kesetaraan gender dapat diartikan bahwa dengan adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial atau manusia. Hal ini diharapkan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.

Feminisme menurut Manggi Humin adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin. Adapun menurut Mansour Fakih, feminisme adalah gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum

perempuan pada dasarnya ditindas dan di eksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.

Gerakan Feminisme lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan.

Sejarah Feminisme

Gerakan Feminisme dimulai sejak abad ke-18, namun diakhiri pada abad ke-20, suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan berarti. Hukum Feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad ke-20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan Critical Legal Studies, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

Walaupun pendapat feminisme bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Aturan hukum yang netral dan objektif sering kali hanya meruakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku.

Feminis menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Perkembangan Feminisme

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman (NOW)* pada tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Fredman berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right (1963)* sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act (1964)* dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada 1960-an menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.

Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Pada tahun 1967 dibentuklah *Student for a Democratic Society (SDS)* yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok "feminisme radikal" dengan membentuk *Women's Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan "Women's Lib". Women's Lib mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Pada tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya "Miss America Pegeant" di Atlantic City yang mereka anggap sebagai "pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan". Gema 'pembebasan kaum perempuan' ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia..

Pada 1975, "*Gender, development, dan equality*" sudah dicanang kan sejak Konferensi Perempuan Sedunia Pertama di Mexico City tahun 1975. Hasil penelitian kaum feminis sosialis telah membuka wawasan jender untuk dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa.

Sejak itu, arus pengutamaan jender atau gender mainstreaming melanda dunia.

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi *sains* yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi sains. Tetapi, kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani masuk dalam wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat patriarkal. Dalam kacamata eko-feminisme, sains modern merupakan representasi kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif.

Berangkat dari kritik tersebut, tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandas pada nilai-nilai perempuan yang anti-eksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itu mereka sebut sebagai sains feminis (*feminist science*).

Aliran Feminisme

1. Feminisme Liberal

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, yang terleleksi menjadi kepentingan yang bersifat "maskulin", tetapi mereka juga

menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memeng memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Feminisme Post Modern

Ide Posmo - menurut anggapan mereka - ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4. Feminisme Anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

5. Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari *property*. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat—borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

6. Feminisme Sosialis

Sebuah paham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisasi pemilikan pria atas

harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

7. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

8. Feminisme Nordic

Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal. Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau politik dari praktik-

praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.

Feminisme di Indonesia

Sebenarnya di Indonesia, kesetaraan gender sudah sangat baik, lihat saja Megawati, beliau seorang perempuan yang menjadi Presiden, sebuah sukses dalam peraih karir yang paling tinggi di negeri ini. Ada Rini Suwandi seorang professional handal yang menjabat sebagai menteri Perdagangan. Sangat mengherankan bahwa kaum feminis Indonesia tidak merasa terwakili oleh prestasi yang diraih mereka ini. Dilain sisi ada banyak sekali wanita karir di Indonesia yang merangkap menjadi ibu tetapi sukses dalam pekerjaannya. Profil-profil tersebut sudah menggambarkan bahwa perempuan mempunyai andil hebat dalam politik dan perekonomian Negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri, gerakan feminisme atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita, muncul setelah R.A Kartini mengumandangkannya. Kita ketahui juga bahwa R.A Kartini dijuluki sebagai emansipator wanita di Indonesia. Tetapi, pada Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandakan bahwa partisipasi dan adanya kesadaran politik dari perempuan Indonesia mulai tumbuh. Lalu muncullah sejumlah organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dari perempuan di Indonesia sendiri terjadi saat pemilu tahun 1955, di mana perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut H. Mc Closky, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela warga negara dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 1998).

Sejak tahun 1975 – Tahun Wanita Internasional – masyarakat internasional, atas prakarsa PBB, telah menempatkan wanita dalam agenda politik tingkat dunia. Usaha ini sekaligus memperbesar peran wanita dan perlunya wanita berpartisipasi lebih banyak dalam setiap keputusan. Walaupun berbagai undang-undang hukum telah melegitimasi mengenai partisipasi politik bagi perempuan, tetapi sampai saat ini perempuan dan dunia politik masih dianggap terlalu janggal dan tidak cocok. Kebanyakan orang menganggap dunia politik terlalu keras dan kejam untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perempuan yang berada di lembaga politik

formal masih sangat kecil dibandingkan laki-laki. Dunia politik selalu seperti diasosiasikan dengan kehidupan laki-laki, karena kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar sumbernya mengingat bahwa masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menganut budaya ideology patriarki.

Budaya patriarki disinilah yang memposisikan perempuan pada peran 'domestik' seperti mengasuh dan mendidik, sementara peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga dan pembuat keputusan. Tetapi, seiring perkembangan jaman, nilai dan norma sosial juga terus berubah. Para perempuan di dunia juga mengalami perubahan, terutama di Indonesia. Mereka mengalami peningkatan dari segi pendidikan, sosial dan bidang tenaga kerja walaupun belum tampak terlalu jelas. Jika diteliti lagi, sebenarnya peran perempuan di Indonesia dalam bidang politik, baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif, masih jauh tertinggal dari lelaki. Menurut data dari Sekretariat DPR, jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibandingkan tahun 1997 yang mencapai 13%. Bahkan untuk tahun 2004, jumlah perempuan yang berada di badan legislatif hanya berkisar 11,8%.

Berdasarkan hasil penelitian Litbang Republika yang bekerja sama dengan *The Asia Foundation*, bahwa keberadaan perempuan di parlemen atau lembaga politik lebih sebenarnya lebih banyak didasarkan pada *charity* daripada kehendak politik yang ingin mereka perjuangkan. Kebanyakan, kehadiran perempuan di parlemen lebih terkait dengan profesi suami mereka yang juga duduk di anggota legislatif atau kursi parlemen.

Sasaran Kritik terhadap Feminisme

Sebenarnya awal bangkitnya gerakan kaum perempuan itu banyak mendapat simpati bukan saja dari kaum perempuan sendiri tetapi juga dari banyak kaum laki-laki, tetapi perilaku kelompok feminisme radikal yang bersembunyi di balik "women's liberation" telah melakukan usaha-usaha yang lebih radikal yang berbalik mendapat kritikan dan tantangan dari kaum perempuan sendiri dan lebih-lebih dari kaum laki-laki. Organisasi-organisasi agama kemudian juga menyatakan sikapnya yang kurang menerima tuntutan "Women's Lib" itu karena mereka kemudian banyak mengusulkan pembebasan termasuk pembebasan kaum perempuan dari agama dan moralitasnya yang mereka anggap sebagai kaku dan buah dari 'agama patriarchy' atau 'agama kaum laki-laki.

Memang memperjuangkan kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan, gaji yang layak, perumahan maupun pendidikan harus diperjuangkan, dan bahkan pemberian hak-suara kepada kaum perempuan juga harus diperjuangkan, tetapi kaum perempuan juga harus sadar bahwa secara kodrati mereka lebih unggul dalam kehidupan sebagai pemelihara keluarga, itulah sebabnya adalah salah kaprah kalau kemudian hanya karena kaum perempuan mau bekerja lalu kaum laki-laki harus tinggal di rumah memelihara anak-anak dan memasak.

Bagaimanapun kehidupan modern, kaum perempuan harus tetap menjadi ibu rumah tangga. Ini tidak berarti bahwa kaum perempuan harus selalu berada di rumah, ia dapat mengangkat pembantu atau suster bila penghasilan keluarga cukup dan kepada mereka dapat didelegasikan beberapa pekerjaan rumah tangga, tetapi sekalipun begitu seorang isteri harus tetap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan rumah tangga tidak dilepaskan begitu saja.

Bila semula gerakan kaum perempuan "feminisme" itu lebih mengarah pada perbaikan nasib hidup dan kesamaan hak, kelompok radikal "Women's Lib" telah mendorongnya untuk mengarah lebih jauh dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas dan telah menjadikan feminisme menjadi suatu "agama baru."

Sebenarnya halangan yang dihadapi 'feminisme' bukan saja dari luar tetapi dari dalam juga. Banyak kaum perempuan memang karena tradisi yang terlalu melekat masih lebih senang 'diperlakukan demikian,' atau bahkan ikut mengembangkan perilaku 'maskulinisme' dimana laki-laki dominan. Sebagai contoh dalam soal pembebasan kaum perempuan dari 'pelecehan seksual' banyak kaum perempuan yang karena dorongan ekonomi atau karena kesenangannya pamer justru mendorong meluasnya prostitusi dan pornografi. Banyak kaum perempuan memang ingin cantik dan dipuji kecantikannya melalui gebyar-gebyar pemilihan 'Miss' ini dan 'Miss' itu, akibatnya usaha menghentikan yang dianggap 'pelecehan' itu terhalang oleh sikap sebagian kaum perempuan sendiri yang justru 'senang berbuat begitu.'

Halangan juga datang dari kaum laki-laki. Kita tahu bahwa secara tradisional masyarakat pada umumnya menempatkan kaum laki-laki sebagai 'penguasa masyarakat,' (male dominated society) bahkan masyarakat agama dengan ajaran-ajarannya yang orthodox cenderung mempertebal perilaku demikian.

Dalam agama-agama sering terjadi 'pelacuran kuil' dimana banyak gadis-gadis harus mau menjadi 'pengantin' para pemimpin agama seperti yang dipraktekkan dalam era modern oleh 'Children of

God´ dan ´Kelompok David Koresy´, dan di kalangan Islam fundamentalis banyak dipraktekkan poligami, dan bukan hanya itu ada kelompok agama di Afrika yang yang mengharuskan kaum perempuan di sunat hal mana tentu mendatangkan penderitaan yang tak habis-habisnya bagi kaum perempuan. Di segala bidang jelas kesamaan hak kaum perempuan sering diartikan oleh kaum laki-laki sebagai pengurangan hak kaum laki-laki, dan kaum perempuan kemudian menjadi saingan bahkan kemudian ingin menghilangkan dominasi kaum laki-laki di masyarakat!

Kritikan prinsip yang dilontarkan pada feminisme khususnya yang radikal (Women´s Lib) adalah bahwa mereka dalam obsesinya kemudian ´mau menghilangkan semua perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki.´ Jelas sikap radikal yang mengabaikan perbedaan kodrat antara kaum perempuan dan laki-laki itu tidak realistis karena faktanya toh berbeda dan menghasilkan dilema, sebab kalau kaum perempuan dilarang meminta cuti haid karena kaum laki-laki tidak haid pasti timbul protes, sebaliknya tentu pengusaha akan protes kalau kaum laki-laki diperbolehkan ikut menikmati ´cuti haid dan hamil´ padahal mereka tidak pernah haid dan tidak mungkin hamil.

Dalam etika kehidupan-pun, sebagian besar masyarakat kita masih menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lebih lemah. Kita jumpai dalam setiap kejadian emergency, kebakaran, kecelakaan dan bencana lainnya. Para "team penolong" selalu akan menolong "women and children" lebih dahulu. Ini sebenarnya didasari atas rasa kemanusiaan saja bukan atas diskriminasi gender.

Kesalahan fatal feminisme radikal ini kemudian menjadikan laki-laki bukan lagi sebagai mitra atau partner tetapi sebagai ´saingan´ (rival) bahkan ´musuh´ (enemy)!´ Sikap feminisme yang dirusak citranya oleh kelompok radikal sehingga menjadikannya ´sangat eksklusif´ itulah yang kemudian mendapat kritikan luas.

Kritikan lain juga diajukan adalah karena dalam membela kaum perempuan dari sikap ´pelecehan seksual;´ mereka kemudian ingin melakukan kebebasan seksual tanpa batas, seperti ´Women´s Lib´ mendorong kebebasan seksual sebebaskan-bebasnya termasuk melakukan masturbasi, poliandri, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak, lesbianisme, bahkan liberalisasi aborsi dalam setiap tahap kehamilan. Kebebasan ini tidak berhenti disini karena ada kelompok radikal yang ´menolak peran kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga´ dan menganggap ´perkawinan´ sebagai belenggu. Andrea Dworkin bahkan menganggap hubungan seksual antara laki-laki dan

perempuan tidak beda dengan perkosaan!'. Dalam hal yang demikian sikap 'Women's Lib' sudah melenceng jauh terhadap hubungan normal cinta-kasih antara laki-laki dan perempuan.

Sebuah Introspeksi

Dibalik kritikan yang ditujukan terhadap "Women's Lib" khususnya dan "Feminisme" umumnya, kita perlu melakukan introspeksi karena sebenarnya "feminisme" itu timbul sebagai reaksi atas sikap kaum laki-laki yang cenderung dominan dan merendahkan kaum perempuan. Ini terjadi bukan saja di kalangan umum tetapi lebih-lebih di kalangan yang meng "atas namakan" agama memang sering berperilaku menekan kepada kaum perempuan.

Dalam menyikapi "feminisme" sebagai suatu gerakan, kita harus berhati-hati untuk tidak menolaknya secara total, sebab sebagai "gerakan persamaan hak" harus disadari bahwa usaha gerakan itu baik dan harus didukung bahkan diusahakan oleh kaum-laki-laki yang dianggap bertanggung jawab atas kepincangan sosial-ekonomi-hukum-politis di masyarakat itu khususnya yang menyangkut gender. Yang perlu diwaspadai adalah bila feminisme itu mengambil bentuk radikal melewati batas kodrati sebagai "gerakan pembebasan kaum perempuan" seperti yang secara fanatik diperjuangkan oleh "Women's Lib."

Kaum laki-laki memang diberi perlengkapan otot yang lebih kuat dan daya juang yang lebih besar, tetapi kaum perempuan diberi tugas sebagai "penolong" yang sejedoh yang sekaligus menjadi ibu anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya. Kita harus sadar bahwa arti "penolong" bukanlah berarti "budak" tetapi sebagai "mitra" atau "tulang rusuk yang melengkapi tubuh." Kesamaan hak harus dilihat dalam rangka tidak melanggar kodrat manusia.

Gerakan feminisme sudah berada di tengah-tengah kita, peran kaum perempuan yang cenderung dimarginalkan dalam masyarakat "patriarchy" sekarang sudah mulai menunjukkan ototnya. Semua perlu terbuka akan kritik kaum perempuan yang dikenal sebagai penganut "feminisme" tetapi feminisme harus pula mendengarkan kritikan dari kaum perempuan sendiri maupun kaum laki-laki agar "persamaan" (equality) tidak kemudian menjurus pada "kebebasan" (liberation) yang tidak bertanggung jawab.

Implikasi dalam Studi Islam

Paham kesetaraan gender yang diusung kaum feminis muslim Indonesia tidak saja meruntuhkan konsep fitrah dan kodrat wanita, akan tetapi juga mendekonstruksi konsep-konsep dasar dalam studi keislaman. Pada tahun 2004 Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta menerbitkan buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Buku ini ditulis dengan tujuan menjadikan kurikulum di sekolah-sekolah memakai perspektif gender dalam beberapa pelajaran terutama pelajaran agama. Ditulis dalam buku itu bahwa perempuan dalam budaya Islam telah mengalami penindasan. Term yang dipakai dalam buku tersebut juga term marxis. Yakni ditulis, kaum wanita tertindas oleh sebuah rezim laki-laki, sebuah rezim yang memproduksi pandangan-pandangan dan praktik patriarkhis. Rezim itu oleh buku tersebut bertahan karena dilindungi ayat-ayat suci.

Buku tersebut memakai kata ‘rezim’ yang khas dipakai oleh kelompok marxis dalam memperjuangkan rakyat melawan pemerintah. Selain itu, buku tersebut menuduh bahwa dalam tradisi Islam terdapat tradisi patriarkhi. Mereka menabur nilai-nilai kebencian, seakan-akan lelaki itu makhluk penindas perempuan, mirip dengan apa yang diperjuangkan feminisme Barat abad ke-18. Dalam pandangan buku itu, konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga ditolak. Menggugat mengapa wanita tidak menjadi imam shalat bagi laki-laki dan mengapa shalat Jum’at hanya untuk laki-laki tapi tidak wajib bagi perempuan.

Bahkan buku ini cukup ekstrim menolak kodrat wanita. Seperti ditulis dalam buku itu: “Seorang ibu hanya wajib melaksanakan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat di luar kodrati itu dapat dilakukan oleh seorang bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan, dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.

Pandangan ini jelas merusak konsep kodrat wanita. Menyusui ditolak sebagai kodrat wanita. Mereka hanya mengaku mengandung dan melahirkan sebagai fitrah wanita. Padahal Allah menciptakan wanita dengan diberi air susu agar supaya memang wanita itu bertugas menyusui anaknya. Bahkan menyusui itu sangat baik dan mempengaruhi hubungan psikologis anak dan ibu. Anak yang disusui oleh ibunya dengan ASI memiliki kaitan batin dengan ibunya.

Strategi pembelajaran perspektif Gender diatur dalam buku *Pengarusutamaan Gender dalam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Buku ditulis oleh Andayani dan kawan-kawan diterbitkan oleh PSW UIN Sunan Kalijaga. Buku ini terbit atas sponsor dan biaya Mc.Gill University. Buku inilah yang menjadi panduan penyusunan silabus pengajaran beberapa mata kuliah di UIN. Dalam mata kuliah Ulumul Qur'an I di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin misalnya, dalam deskripsi mata kuliah ditulis: "Pendekatan dalam kuliah sedapat mungkin berspektif gender dengan mengemukakan berbagai contoh yang mendukung kesetaraan gender". Masih dalam deskripsi tersebut, bahwa mata kuliah ini juga mengajarkan teori evolusi syari'ah. Dalam mata kuliah tersebut mahasiswa diajarkan bagaimana menafsirkan al-Qur'an dalam kerangka paham feminisme. Sehingga model tafsir yang diproduksi adalah 'tafsir feminis'. Semangat ini mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh Stanton dengan karyanya *Women's Bible*. Anggapan ini tidak berlebihan sebab PSW UIN juga memakai metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an, sama halnya dengan feminisme Barat yang menggunakan metode tersebut untuk memaknai Bibel.

Teori hermeneutika digunakan untuk menempatkan al-Qur'an dalam kerangka paham feminisme. Teori ini berakibat fatal, tidak saja mendekonstruksi hukum-hukum Islam, akan tetapi berimplikasi menempatkan al-Qur'an sebagai produk budaya (*muntaj tsaqafi*). Sebuah buku hasil disertasi berjudul *Argumentasi Kesetaraan Jender: Pespektif al-Qur'an* menjelaskan langkah metodologis dalam menempatkan al-Qur'an ke dalam kerangka paham kesetaraan gender. Di antaranya ditulis; "mendudukan al-Qur'an setara dengan teks naskah-naskah lainnya yang tidak memiliki makna kesucian, melakukan kritik terhadap metode tafsir dan ulumul Qur'an yang telah digali sejak zaman sahabat dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Buku itu mengkritik penggunaan bahasa, diman Tuhan menggunakan kata ganti laki-laki (*mudzakkar*). Seperti kata ganti (*huwa*). Tulisan tersebut mengindikasikan seakan-akan Tuhan itu bias gender.

Kedudukan Perempuan menurut Prof. Dr. Hamka

Terbukanya keran demokrasi dan kebebasan berbicara telah membuka suara-suara dan ide-ide yang selama ini cendrung bungkam karena ditekan oleh tindakan represif penguasa. Sekarang, setiap orang bebas mengekspresikan kehendaknya tanpa takut lagi akan dihukum,

diberendel, dan diberangus oleh pihak-pihak tertentu yang merupakan perpanjangan tangan penguasa.

Salah satu bidang yang mendapat porsi yang cukup besar dan mendapatkan ruang gerak yang leluasa adalah menyangkut masalah perempuan. Isu-isu dan gerakan tentang emansipasi, kesetaraan gender, dan perjuangan hak-hak perempuan telah menjadi perbincangan dan wacana yang menarik.

Atmosfir perbincangan tentang perempuan ini semakin hangat ketika kasus-kasus pelecehan, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari media baik elektronik maupun cetak menayangkan berita pemerkosaan, kekerasan suami terhadap istri dan anak perempuan, tingkat aborsi yang sangat tinggi (mencapai 4 juta kasus setiap tahunnya di Negara ini).

Perlakuan yang diskriminatif dan semena-mena terhadap perempuan ini tidak hanya berada pada dataran kasus per kasus, namun telah menginjak dataran kebijakan pemerintah.

Prinsip persamaan telah menjadi bagian dari sistem hukum kita yang tertuang dalam pasal 27 UUD 1945. Di samping itu, pemerintah telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti konvensi ILO No. 100 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, konvensi tentang hak-hak politik perempuan dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah pun juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan lain, seperti: dalam peraturan tentang perkawinan dan perceraian yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya jika dikaji lebih lanjut, peraturan itu justru bias gender. Sebab dalam putusannya, di satu sisi menjamin hak yang sama dalam hukum dan masyarakat antara perempuan dan laki-laki, di sisi lain dinyatakan bahwa laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan berperan di sektor privat (di rumah saja). Malah UU ini memberi peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu.

Pada penelitian ini, penulis ingin menelaah tentang feminisme ini dengan mengambil pemikiran Prof. Dr. Hamka. Hal ini dikarenakan, sosok beliau telah banyak menciptakan karya-karya fenomenal yang sangat kental nuansa filosofisnya. Ada 4 buku yang telah beliau tulis yang diberi judul “Mutiaras Filsafat” yaitu Tasauf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi dan Lembaga Hidup. Melalui pisau analisis filsafat manusia yang ditulis Hamka dalam karya-karyanya, peneliti

mencoba untuk mengambil dan mengungkapkan pandangan Hamka terhadap kedudukan perempuan.

Mazhar ul-Haq Khan, dalam bukunya “Wanita Islam Korban Patologi Sosial”, membahas secara khusus tema purdah (hijab) dan poligami dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Rosemarie Putnam, dalam bukunya “Feminism Thought”, memberikan penjelasan komprehensif mengenai feminisme dan menguraikan aliran-aliran feminisme yang ada di dunia.

Adnan Tharsyah, dalam bukunya “Serba Serbi Wanita”, menyampaikan konsep-konsep yang ideal bagi perempuan ditinjau dari aspek biologis dan psikologis menurut ajaran Islam.

Gaya Kepemimpinan Perempuan bagi Efektifitas Organisasi

Memang ada kecenderungan perbedaan dalam gaya kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki karena sifatnya, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif sehubungan dengan tujuan organisasi yang harus dicapainya, tidaklah cukup hanya karena sifat perempuan atau karakteristik yang melekat pada dirinya, melainkan banyak faktor lainnya yang ikut mempengaruhinya. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan bagi efektivitas organisasi mencakup: pemilihan dan penempatan pemimpin, pendidikan kepemimpinan, pemberian imbalan pada prestasi pemimpin dan bawahan, teknik pengelolaan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan, dan teknologi.

Kajian terhadap sejumlah literatur oleh Robbins (1998), sehubungan dengan isu gender dan kepemimpinan mengemukakan dua kesimpulan. *Pertama*, menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan diantara keduanya. *Kedua*, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih *democratic*, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat *directive* (menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah).

Kesamaan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidak begitu mengherankan. Hampir semua studi yang melihat pada isu tersebut menggunakan ‘jabatan manajerial’ sebagai persamaan dari ‘kepemimpinan’. Dalam hal ini, perbedaan *gender* yang nampak dalam populasi pada umumnya cenderung bukan merupakan bukti karena ini merupakan pilihan karir pribadi dan seleksi organisasi. Sama seperti orang-orang yang memilih karir di bidang penegakan hukum, kedokteran atau bidang-bidang lainnya memiliki persamaan-persamaan. Jelasnya para individu, perempuan maupun laki-laki yang memilih

karir manajerial cenderung memiliki kesamaan. Para individu dengan sifat kepribadian yang berkaitan dengan kepemimpinan, seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan kemampuan bersosialisasi, kemungkinan lebih diterima sebagai para pemimpin dan mendorong untuk mengejar karir dimana mereka dapat melaksanakan kepemimpinannya. Berbeda dengan kesimpulan pertama, sejumlah studi lainnya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan inheren antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaya kepemimpinannya. Perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih demokratis. Mereka mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, dan mencoba untuk meningkatkan 'kemanfaatan' bagi pengikutnya. Mereka cenderung memimpin melalui pelibatan atau pemberdayaan dan mendasarkan pada kharisma, keahlian, kontak, dan keahlian interpersonal dalam mempengaruhi orang lain. Sebaliknya laki-laki, cenderung lebih menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan perintah. Mereka lebih mendasarkan pada jabatan otoritas formal sebagai dasar baginya untuk melakukan pengaruhnya.

Konsisten dengan kesimpulan yang *pertama*, guna membuktikan lebih akurat bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, maka penemuan ini oleh para peneliti tersebut dikualifikasikan dengan cara memasukkan variabel kontrol. Ini dimaksudkan agar dapat diketahui dengan benar apakah perbedaan *gender* benar-benar mempengaruhi tingkat efektivitas seseorang dalam memimpin ataukah tidak. Dengan memasukkan variabel kontrol yakni 'jenis pekerjaan yang banyak didominasi kaum laki-laki', penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat tingkat kecenderungan penurunan bagi pemimpin perempuan yang semula lebih demokratis ketimbang laki-laki menjadi kurang demokratis terutama ketika perempuan tersebut berada dalam pekerjaan didominasi laki-laki.

Jelasnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif bagi organisasi, bukan karena maskulinitas atau femininitasnya, melainkan kapasitasnya untuk memimpin. Efektivitas pemimpin untuk mampu mencapai efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) pemilihan dan penempatan pemimpin, (2) pendidikan kepemimpinan, (3) pemberian imbalan pada prestasi pemimpin dan bawahan, dan (4) teknik pengelolaan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan, dan (5) teknologi.

Daftar Pustaka

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/feminime>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemimpinan>

Jakarta. 1998

Maulana, Ahmad dkk. Kamus Ilmiah Populer Lengkap. Absolute.
Yogyakarta 2008

Udaya, Jusuf. Kepemimpinan Dalam Organisasi edisi Bahasa
Indonesia. Pren Hellindo.

yogielsandi.blogspot.com/2012/04/v-behavorurldefaultvmlo.html?m=1